

## ABSTRAK

Hannah Victoria (01043180010)

### **ANALISIS KERJA SAMA PENGELOLAAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DALAM ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2014-2019**

(xvii + 74 Halaman: 4 Gambar; 2 Tabel; 3 Lampiran)

**Kata Kunci** = Kerja sama Bilateral, Sengketa Perbatasan, Indonesia-Malaysia, Kejahatan Transnasional, Keamanan Manusia

Sengketa perbatasan yang terjadi antarnegara merupakan ancaman konstan yang dapat membahayakan kedaulatan maupun keamanan suatu negara. Sebagai pintu gerbang utama, wilayah perbatasan memiliki peran yang sangat strategis dalam keberlangsungan pertahanan setiap negara. Seiring dengan berkembangnya zaman, sengketa perbatasan tidak hanya menyangkut ancaman tradisional yang bersifat militeristik, melainkan juga ancaman non-tradisional yang berpusat pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan manusia (*human security*). Hal inipun sejalan dengan berbagai kasus kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia (*human trafficking*) hingga aksi terorisme. Melihat adanya permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara ini, maka Indonesia dan Malaysia berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan keamanan warga negaranya dengan menjalin kerja sama bilateral pengelolaan perbatasan yang telah berlangsung sejak tahun 1967. Pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kerja sama pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia yang berfokus pada periode pertama Presiden Joko Widodo yang berlangsung dari tahun 2014-2019. Dalam menjelaskan kerja sama bilateral pengelolaan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan menyajikan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan kerja sama perbatasan Indonesia-Malaysia pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo berjalan cukup baik, dimana kebijakan luar negeri Jokowi banyak berpusat pada pendekatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berada di sepanjang wilayah perbatasan.

**Referensi:** 10 buku (1958-2014) + 18 artikel jurnal + 10 dokumen resmi dan publikasi pemerintah+ 6 artikel daring

## ABSTRACT

Hannah Victoria (01043180010)

### **THE ANALYSIS OF MANAGING BOUNDARY COOPERATION BETWEEN INDONESIA-MALAYSIA IN THE FIRST TERM OF PRESIDENT JOKO WIDODO (2014-2019)**

(xvii + 74 pages: 4 Pictures, 2 Tables, 3 Appendices)

**Keywords** = Bilateral Cooperation, Boundary Conflict, Indonesia-Malaysia, Transnational Crime, Human Security

Border conflict among countries has become a constant threat that can endanger the sovereignty and security of a nation. As the main gate, border territory has a very strategic role in every nation's existence of defence. In pace with the advancement of age, boundary conflicts do not only involve militaristic traditional threat but also a non-traditional one which is centered towards human welfare and security. This is in line with various case of transnational crimes that happen in territory border of Indonesia-Malaysia, such as illegal goods smuggling, human trafficking even the acts of terrorism. Viewing the problem faced by these two nations, Indonesia and Malaysia try their all effort to accommodate the security needs of their citizens by building bilateral cooperation in managing their border which has been going on since 1967. In this research, the writer has the purpose to analyze the effectiveness of implementation of managing Indonesia-Malaysia border cooperation focusing on the first term of President Joko Widodo (2014-2019). In describing the bilateral cooperation in managing Indonesia-Malaysia border, this research uses descriptive analysis technique by presenting secondary data obtained through literature studies. Whereas, the result of this research states the implementation of Indonesia-Malaysia border cooperation in the first term of Joko Widodo has been carried out quite well, in which Jokowi's foreign policy is greatly centered on welfare approach having the purpose to provide the sense of security for the citizen living in the border territory.

**References:** 10 books (1958-2014) + 18 journal articles + 10 official documents and government publications; 6 online sources